

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan (2005) yaitu hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Teori keagenan didasarkan pada 3 asumsi yaitu asumsi informasi, asumsi sifat manusia dan asumsi keorganisasian. Asumsi informasi merupakan asumsi yang menekankan bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat untuk mementingkan diri sendiri, mempunyai keterbatasan rasional dan tidak menyukai resiko. Dan asumsi keorganisasian menekankan adanya konflik keorganisasian, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara principal dan agen.

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham, maka manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Tetapi sering terjadi konflik antara

manajemen dengan pemegang saham, yang dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal.

Agency problem akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasar maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Kondisi di atas merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi pengelola dengan fungsi kepemilikan (Jensen dan Meckling, 1976). Para pemegang saham umumnya melakukan investasi pada portofolio yang sudah terdiversifikasi dengan baik, oleh karena itu mereka hanya peduli terhadap resiko sistematis perusahaan. Sedangkan manajer peduli terhadap resiko perusahaan secara keseluruhan. Hal ini merupakan salah satu penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham yang disebut keputusan pendanaan.

Laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan (Watt & Zimmerman, 1986). Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya dan serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen.

2.1.2 Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Comittee* pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal dengan nama *Cadbury Report*. Laporan ini di

pandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik *corporate governance* diseluruh dunia (Moeljono,2005 dalam Lestari, 2010).

Pilar-pilar yang melandasi prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh OECD adalah :

1. *Fairness* (Keadilan)

Secara sederhana fairness bisa didefinisikan sebagai suatu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakkan peraturan untuk melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai macam bentuk kecurangan.

2. *Transparency* (Keterbukaan informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan ialah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan resiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Dalam mewujudkan transparency, perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan dengan mudah pada saat diperlukan.

3. *Accountability*

Accountability adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip accountability adalah praktik audit internal yang efektif, serta kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, dan statement of corporate intent (pencapaian target dimasa depan) serta terhindar dari kondisi agency problem.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan ialah kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan didalam prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku tersebut termasuk yang mengenai masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja dan standar penggajian dan persaingan yang sehat.

2.1.2.1 Komisaris Independen

Pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal.

Dewan komisaris memegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian perusahaan. Meskipun Pedoman *Good Corporate Governance* tidak menentukan jumlah Komisaris Independen, dalam Peraturan Bapepam-LK, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen sedangkan Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

2.1.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau persentasi saham yang dimiliki oleh komisaris, dewan direksi dan manajemen yang tercantum didalam daftar pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer.

Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Pemusatan kepentingan dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (*aligned*) dapat mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat dikurangi, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tetapi tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi,

mereka mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer (Siswantaya, 2007 dalam Praditia, 2010).

2.1.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi baik yang bergerak dalam bidang keuangan atau nonkeuangan atau dalam bidang hukum lain. Pengendalian perusahaan tidak hanya terkait pada konsentrasi kepemilikan melainkan juga terkait dengan identitas pemegang saham. Fungsi pengendalian akan semakin efektif apabila pemegang saham memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dibidang ekonomi (Gedajlovic, 2003 dalam Wulandari, 2006).

Nilai absolute diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan institusional. Hasil-hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada efek *feedback* dari kepemilikan instusional yang dapat mengurangi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Jika pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi *earnings management* (Jiambavo et al, 1996 dalam Pertiwi, 2010).

2.1.2.4 Kualitas Audit

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat pada para manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan (Meutia, 2004). Akuntan publik sebagai auditor eksternal yang relatif lebih independen dari manajemen dibandingkan auditor internal sejauh ini diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas, relevan dan dapat dipercaya dihasilkan dari audit yang dilakukan secara efektif oleh auditor yang berkualitas. Pemakai laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas dibandingkan dengan auditor yang kurang berkualitas, karena mereka menganggap bahwa untuk mempertahankan kredibilitasnya auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji atau kecurangan. Auditor yang berkualitas akan melakukan audit yang berkualitas pula.

Meutia (2004) menyimpulkan bahwa kantor akuntan publik yang lebih besar, kualitas audit yang dihasilkan juga lebih baik. Perbedaan kualitas jasa yang ditawarkan kantor akuntan publik menunjukkan identitas kantor akuntan publik tersebut. Independensi dan kualitas auditor dapat berdampak pada pendeteksian manajemen laba. Terdapat dugaan bahwa auditor yang bereputasi baik dapat mendeteksi kemungkinan adanya manajemen laba secara lebih dini sehingga

dapat mengurangi tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

2.1.2.5 Komite Audit

Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *corporate governance*. Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Komite Audit bertindak mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai perusahaan yang bersangkutan, dan memiliki keahlian, pengalaman dibidang audit dan kualitas lain yang diperlukan. Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

2.1.3 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan, untuk mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu, walaupun dalam jangka

panjang tidak terdapat perbedaan laba yang dapat diidentifikasi sebagai suatu keuntungan (fischer dan roseinzwieg,1995).

Masalah manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran dan perbedaan kepentingan antara pemilik (principal) dan pengelola perusahaan (agen). Selain itu, manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi mengenai perusahaan lebih banyak dan lebih valid daripada pemegang saham, sehingga memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi yang berorientasi pada angka laba, yang dapat menciptakan kesan (prestasi) tertentu.

Scott (2000) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua,yaitu:

1. Melihatnya sebagai perilaku opportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs (opportunistic earnings management)*.
2. Memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient earnings management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Scott (1997) dalam Praditia (2010) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba seperti berikut ini:

1. Rencana bonus (*Bonus scheme*).

Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya.

2. Kontrak utang jangka panjang (*Debt covenant*).

Ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang.

3. Motivasi politik (*Political motivation*).

Menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi tingkat visibilitasnya terutama saat periode kemakmuran yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah.

4. Motivasi perpajakan (*Taxation motivation*).

Ini menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

5. Pergantian CEO (*Chic/Executive Officer*).

Biasanya CEO yang akan pensiun atau masa kontraknya menjelang berakhir akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Hal yang sama akan dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya adalah menghindarkan diri dari pemecatan sehingga mereka cenderung untuk meminimalkan jumlah laba yang dilaporkan.

6. Penawaran saham perdana (*Initial public offering*).

Menyatakan bahwa pada awal perusahaan menjual sahamnya kepada publik, informasi keuangan yang dipublikasikan dalam prospektus merupakan sumber informasi yang sangat penting. Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Guna mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para investor maka manajer akan berusaha untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.

Praktik yang dilakukan untuk mempengaruhi angka laba dapat terjadi secara legal maupun tidak legal. Praktik legal dalam manajemen laba berarti usaha untuk mempengaruhi angka laba tidak bertentangan dengan aturan pelaporan keuangan dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), yaitu dengan cara memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, melakukan perubahan metode akuntansi, dan menggeser periode pendapatan atau biaya. Adapun manajemen laba yang dilakukan secara illegal (disebut juga dengan *financial fraud*), dilakukan dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh Pedoman Akuntansi Berterima Umum (PABU), yaitu dengan cara melaporkan transaksi-

transaksi pendapatan atau biaya secara fiktif dengan cara menambah (*mark up*) atau mengurangi (*mark down*) nilai transaksi, atau mungkin dengan tidak melaporkan sejumlah transaksi, sehingga akan menghasilkan laba pada nilai/tingkat tertentu yang dikehendaki (Rama, 2012).

Secara sederhana, laba merupakan selisih lebih antara pendapatan (termasuk keuntungan) dengan beban (termasuk kerugian). Maka, secara umum, teknik untuk merekayasa laba dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan atau menurunkan pendapatan maupun menurunkan atau meningkatkan beban, atau gabungan dari keduanya. Teknik-teknik dalam manajemen laba seperti diuraikan Mulford dan Comiskey (2010) antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknik Manajemen Laba

No.	Teknik	Tujuan
1.	Menetapkan cadangan piutang tak tertagih	Perusahaan dapat memperkecil biaya piutang tak tertagih untuk menaikkan laba periode berjalan dengan menetapkan cadangan piutang tak tertagih yang kecil.
2.	Menetapkan cadangan kewajiban jaminan garansi	Dengan menetapkan kecil cadangan kewajiban jaminan garansi, perusahaan dapat memperkecil biaya jaminan garansi untuk menaikkan laba periode berjalan.
3.	Mengestimasi tahap penyelesaian kontrak dengan metode persentase penyelesaian	Dengan menetapkan persentase penyelesaian yang besar, perusahaan dapat mengakui pendapatan lebih besar untuk menaikkan laba periode berjalan.
4..	Mempertimbangkan jumlah persediaan yang dihapus	Dengan menurunkan jumlah persediaan yang seharusnya dihapuskan, perusahaan dapat mengurangi beban tahun ini untuk

		menaikkan laba periode berjalan.
5.	Mengakui pendapatan atas pengiriman barang ke kantor perwakilan	Dengan mengakui pendapatan atas pengiriman barang ke kantor perwakilan yang sebenarnya belum terjual, perusahaan mengakui pendapatan lebih besar untuk menaikkan laba periode berjalan.
6.	Tidak menutup periode akuntansi	Dengan tetap membuka periode akuntansi, perusahaan masih tetap dapat mencatat penjualan periode berikutnya untuk menaikkan laba periode berjalan. Teknik ini biasanya dilakukan dengan memundurkan tanggal pada komputer.
7.	Mengakui seluruh penjualan yang pengirimannya tidak sekaligus	Dengan mengakui penjualan barang yang belum dikirim, perusahaan mengakui pendapatan lebih besar untuk menaikkan laba periode berjalan.
8.	Menilai terlalu tinggi persediaan akhir	Dengan menilai terlalu tinggi persediaan, perusahaan dapat mengurangi harga pokok penjualan untuk menaikkan laba periode berjalan.
9.	Memalsukan umur piutang	Perusahaan dapat mengurangi beban piutang tak tertagih tahun ini untuk menaikkan laba periode berjalan.

2.1.4 Nilai Perusahaan

Dalam mengambil keputusan-keputusan yang benar, manajer perlu menentukan tujuan yang ingin di capai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Tujuan keputusan keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Karena dengan memaksimumkan nilai perusahaan maka akan mensejahterakan pemilik perusahaan tersebut. Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga

pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Menurut Rika dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris.

Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya yaitu menggunakan Tobin's Q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (1967). Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin's Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan

operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004).

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi (Herawaty, 2008). Semakin besar nilai rasio Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan, semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

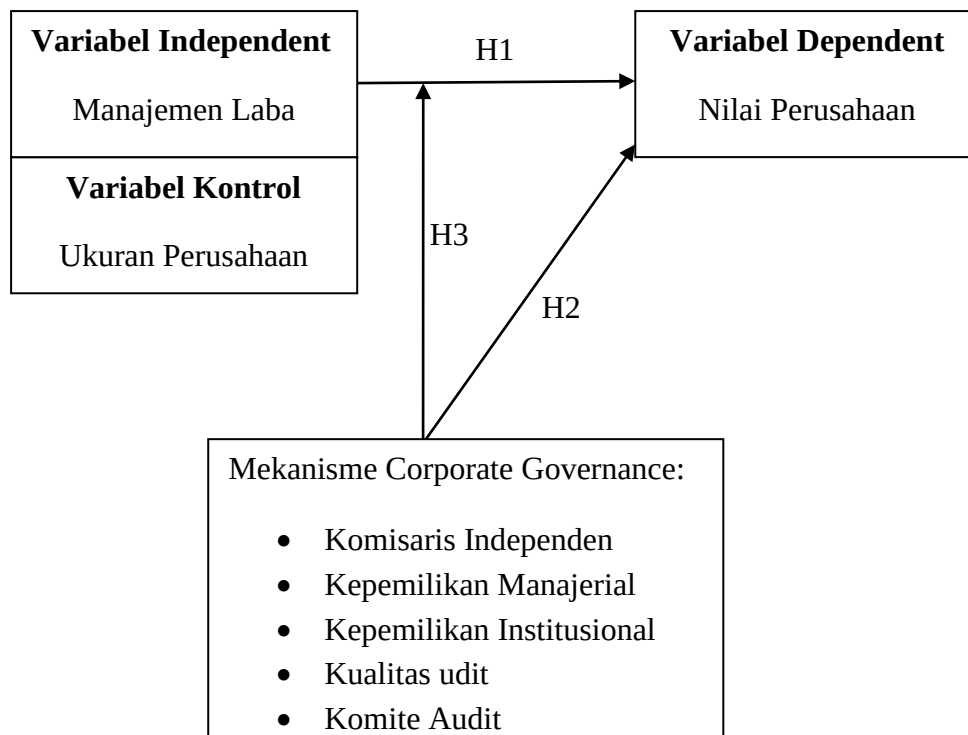
Beberapa penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan *corporate governance*, manajemen laba dan nilai perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Pertiwi, Diah Ayu (2010) yang melakukan penelitian tentang analisis pengaruh *earning management* terhadap nilai perusahaan dengan peranan praktik *corporate governance* sebagai moderating variable, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dari 4 proksi *corporate governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, klasifikasi akuntan publik) variable kepemilikan institusional dan klasifikasi akuntan public akan meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan komisaris independen akan menurunkan nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel pada perusahaan non keuangan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2008.

Penelitian tentang analisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba dan nilai perusahaan oleh Praditia, Okta Rezika (2010) dimana mekanisme GCG yang digunakan adalah kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, komisaris independen dan kualitas auditor. Populasi yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sejak tahun 2005 hingga 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba ataupun nilai perusahaan.

Penelitian tentang "Peran Praktek *Corporate Governance* Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh *Earning Management* Terhadap Nilai Perusahaan" oleh Herawaty, Viola (2008) membuktikan bahwa variabel *Corporate Governance* mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial akan menurunkan nilai perusahaan sedangkan klasifikasi akuntan publik akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini mengambil populasi perusahaan-perusahaan non keuangan yang telah listing di BEI tahun 2004-2006. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

2.3 Model Penelitian

Kerangka Pemikiran Hubungan Antara Variabel



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Manajemen Laba dan Nilai Perusahaan

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding pemilik sehingga menimbulkan kesenjangan informasi. Kondisi ini sering disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetric*). Dengan adanya asimetri informasi, menyebabkan prinsipal tidak dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga manajer dapat memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan standar akuntansi untuk melakukan manajemen laba. Manajer melakukan manajemen laba untuk

meningkatkan nilai perusahaan pada saat tertentu sehingga dapat menyedapkan pemilik (pemegang saham) mengenai nilai perusahaan sebenarnya.

Ayres (1994) dalam Herawati (2008) menjelaskan alasan dilakukannya manajemen laba yaitu: (1) Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer karena manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba dan prestasi usaha suatu organisasi, (2) Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor karena dengan menaikkan pendapatan maupun laba akan memberi posisi bargaining yang relatif baik dalam negosiasi atau penjadwalan ulang utang antara pihak kreditor dan perusahaan, dan (3) Manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya terutama pada perusahaan yang go publik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *earning management* dapat meningkatkan nilai perusahaan pada saat tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2008) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika mempertimbangkan variabel *corporate governance*. Dalam penelitian ini mengambil populasi perusahaan-perusahaan non keuangan yang telah *listing* di BEI tahun 2004-2006.

Pertiwi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel *earning management* mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.2 Corporate Governance dan Nilai Perusahaan

2.4.2.1 Komisaris Independen

Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Siallagan dan Machfoedz (2006) menggunakan proporsi komisaris independen untuk mengetahui pengaruhnya nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q, menemukan bahwa proporsi komisaris berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Besley (1996) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris dari luar lebih dapat untuk mengurangi kecurangan pelaporan keuangan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2a : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.2.2 Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara manajemen dengan pemegang saham rawan untuk terjadinya masalah keagenan. Untuk mengurangi masalah keagenan tersebut, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan adanya kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang. Dengan kepemilikan tersebut,

manajemen akan merasakan langsung dampak dari setiap keputusannya termasuk dalam menentukan kebijakan hutang perusahaan (Iqbal, 2007 dalam Praditia, 2010).

Wahyudi dan Pawestri (2006) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2b : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.2.3 Kepemilikan Institusional

Pada umumnya investor institusional merupakan pemegang saham yang cukup besar dan sekaligus memiliki pendanaan yang besar. Ada pendapat yang beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki pendanaan besar, maka kecil kemungkinan berisiko mengalami kebangkrutan. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal

terhadap kinerja manajemen dan nilai perusahaan (Haruman, 2007 dalam Praditia, 2010).

Investor institusional yang dianggap sebagai *sophisticated investor* memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan secara efektif, sehingga dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Fuerst dan Kang (2000) dalam Praditia (2010) menemukan hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dengan nilai pasar setelah mengendalikan kinerja perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2c : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan.

2.4.2.4 Kualitas Audit

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan (Meutia, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa auditor berperan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, dengan penggunaan auditor yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan nilai

perusahaan. Herawaty (2008) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kualitas audit dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2d : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.4.2.5 Komite Audit

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) menguji pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada periode 2000-2004 menyatakan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba dan juga nilai perusahaan yang dihitung dengan Tobin's Q. Hal ini memberi bukti bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2e : Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.3 Corporate Governance, Manajemen Laba dan Nilai Perusahaan

2.4.3.1 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Komisaris independen mempunyai peran penting dalam aktivitas pengawasan perusahaan. Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal, mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Klein (2002) dalam Herawaty (2008) membuktikan bahwa besarnya *discretionary accrual* lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari sedikit komisaris independen dibanding perusahaan yang mempunyai komite audit yang terdiri banyak komisaris independen. Komisaris independen dapat memonitor manajemen dalam rangka menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka dapat mengurangi aktivitas manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3a : Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah dengan adanya komisaris independen.

2.4.3.2 Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham.

Masalah keagenan dapat diminimalisasi dengan cara memperbesar kepemilikan manajerial sehingga manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham. Hal itu akan berpengaruh pada kualitas laba yang dihasilkan dan nilai perusahaan. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2007) dalam Praditia (2010) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap praktek manajemen laba dengan arah hubungan negatif. Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3b : Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah dengan adanya kepemilikan manajerial.

2.4.3.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham oleh investor institusional berperan untuk memonitor kinerja manajemen perusahaan dengan lebih efektif dan mempengaruhi manajer dalam pengambilan keputusan agar manajemen perusahaan tidak bertindak sesuai keinginannya sendiri (Iqbal, 2007 dalam Praditia, 2010). Investor institusional yang sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non institusional.

Hasil penelitian Jiambavo dkk (1996) dalam Pertiwi (2010) menemukan bahwa nilai absolut diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan institusional.

Balsam dkk (2002) menemukan hubungan yang negatif antar *discretionary accrual* yang tidak diekspektasi dengan imbal hasil di sekitar tanggal pengumuman karena investor institusional mempunyai akses atas sumber informasi yang lebih tepat waktu dan relevan yang dapat mengetahui keberadaan pengelolaan laba lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan investor individual.

Hasil-hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada efek feedback dari kepemilikan institusional yang dapat mengurangi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Jika pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi *Earnings Management*.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3c : Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah dengan adanya kepemilikan instutusional.

2.4.3.4 Kualitas Audit

Untuk mengatasi terjadinya konflik kepentingan antara agen dan principal yang terjadi dalam perusahaan termasuk mengurangi manipulasi laba oleh manajemen, maka diperlukan beberapa mekanisme pengawasan dan kontrak. Salah satunya adalah dengan audit atas laporan keuangan. Manajemen perusahaan sebagai agen memerlukan jasa pihak ketiga agar tingkat kepercayaan pihak eksternal perusahaan terhadap pertanggungjawaban semakin tinggi, begitupula sebaliknya pihak eksternal perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Auditor merupakan salah satu mekanisme untuk mengendalikan perilaku manajemen, dengan demikian proses pengauditan memiliki peranan penting dalam mengurangi biaya keagenan dengan membatasi perilaku opportunistic manajemen. Becker (1998) dalam Praditia (2010) menemukan bahwa manajemen laba besar dalam perusahaan dengan kualitas auditor yang lebih rendah daripada perusahaan dengan kualitas auditor yang lebih tinggi. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan proksi ukuran KAP, karena diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. Auditor yang bekerja di KAP Big Four dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit

yang lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari non KAP Big Four (Isnanta, 2008 dalam Welvin dan Herawaty, 2010).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3d : Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah dengan adanya kualitas audit.

2.4.3.5 Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengawasi sistem pengendalian internal. Keberadaan komite audit diharapkan dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit dapat mengurangi aktivitas *earning management* yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3e : Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah dengan adanya komite audit.